

ISSN : 0126-396X

Dialog

Vol. 72, No. 2, Tahun. XXXIV, Nopember 2011

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Pasang Surut Politik Islam

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Jurnal Dialog | Nomor 072 | Tahun XXXIV | Halaman 150 | Jakarta Nop 2011 | ISSN 0126-396X |
|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011

Terakreditasi C No:
362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

Pemimpin Umum:

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:

DR.H.M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

Wakil Pemimpin Redaksi:

H. Wahyudi, S.Pd.

Sekretaris Redaksi:

Hj. Astuti Nilawati, S.Pd.

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. H.M. Athon Mudzhar, M.A.
2. Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, M.A.
3. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar
4. Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah

Dewan Redaksi:

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
2. Dr.H. Imam Tholikhah
3. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.
4. Drs. Choirul Fuad Yusuf, SS, M.A.
5. H. Chamdi Pamudji, SH, MM.
6. Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc.

Redaktur Eksekutif:

M. Nasir, S.Th.I

Redaktur Pelaksana:

1. Abas Jauhari, MSI.
2. Umu Rahmah

Administrasi:

1. Mulyadi Azwan
2. Dra. Hj. Aini Moerad
3. Willa Widdharari, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama
Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380
Website: www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id

PENGANTAR REDAKSI

PASANG SURUT POLITIK ISLAM

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, dan mengalami pasang surut. Politik identitas yang coba ditampilkan oleh umat Islam melalui perwakilan tokoh-tokohnya mengalami kekalahan, di antaranya ketika tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus. Meskipun begitu keberhasilan politik Islam pada pemilu pertama menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan tercatat sebagai partai pemenang kedua (Masyumi) dan ketiga (NU) setelah PNI. Namun keberhasilan yang ditunjukkan umat Islam pada pemilu tahun 1955 rontok pada masa Presiden Soekarno dengan penerapan Demokrasi Terpimpinnya. Apalagi setelah tokoh-tokoh penting

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, intelektual dan akademisi untuk mengkomunikasikan gagasan secara ilmiah dan kreatif bagi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia

partai Masyumi dipenjarakan oleh sang presiden, keperkasaan politik umat Islam sedikit memudar.

Gerakan reformasi pasca berakhirnya orde baru telah mengubah wajah perpolitikan Indonesia, demikian pula perpolitikan umat Islam. Kondisi negara yang cenderung tidak setabil menuntut berbagai pihak merasa perlu untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik, atas persoalan-persoalan bangsa, berkaitan dengan seluruh tatanan masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi. Berbagai kepentingan, baik yang mendasari atas nama bangsa dan kelompok tertentu, juga ikut mewarnai.

Terbukanya kran kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat menjadi salah satu pendorong menguatnya gerakan masyarakat sipil. Di satu sisi, gerakan ini menjadi harapan karena mampu mendorong dan menjadi stabilisator pemerintahan, namun di saat yang lain semakin mengancam. Kegetiran masyarakat atas berbagai persoalan terutama dalam hal ekonomi, politik, dan degradasi moral menjadikan masyarakat mencari alternatif baru.

Salah satunya adalah munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang kemudian melahirkan banyak gerakan. Konsolidasi di tingkatan negara terus dilakukan, namun pada saat yang sama, terdapat konsolidasi internal di kalangan umat Islam. Eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada pasca revolusi pernah dianggap sebagai pesaing yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan

domestikasi terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktifis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara. Tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik "minoris" atau "outsider". Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi Negara Pancasila. Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan Negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut berspektrum luas.

Munculnya partai-partai Islam di Indonesia telah menimbulkan perdebatan tersendiri. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau ada yang mengistilahkan sebagai "repolitikasi Islam". Ketika berhadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam seringkali dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Jurnal Dialog vol. 72 XXXIV, 2011 ini mencoba menyoroiti Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan M. Firdaus

Khalimi tentang *Memahami Politik Masyarakat Muslim*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Himawan Sutanto, yang menulis tentang *Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting?* Sedangkan Miftahussurur menghadirkan tulisannya tentang *Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia*. Ifa Avianty dan Thobib Al-Asyhar menghadirkan tulisan tentang *Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa*. Edisi ini kian menarik dengan hadirnya tulisan Herdi Sahrasad tentang *Reformasi Mesir: Berkaca pada Indonesia?* dan Ihsan Ali-Fauzi yang menghadirkan tulisan tentang *"Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi'ah*. Kajian semakin lengkap dengan hadirnya tulisan Abdul Waid tentang *Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas: Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama hingga Era Orde Reformasi*.

Pada edisi ini juga dihadirkan kajian Ismatu Ropi tentang Rohis: *Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama*, dan tulisan Nursh Shalihin Djamra tentang *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang berjudul *Negara Islam* karangan Musdah Mulia. Buku ini secara umum mengurai dan mengulas pemikiran Haikal tentang negara Islam. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam kajian politik Islam, khususnya di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

DAFTAR ISI

TOPIK

FIRDAUS KHALIMI

Memahami Politik Masyarakat Muslim — 1

MUHAMMAD HIMAWAN SUTANTO

Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting ? — 12

MIFTAHUSSURUR

Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia — 26

IFA AVIANTY DAN THOBIB AL-ASYHAR

Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa — 44

HERDI SAHRASAD

Reformasi Mesir : Berkaca pada Indonesia? — 63

IHSAN ALI FAUZI

Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi`ah — 83

ABDUL WAID

Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas : Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama Hingga Era Orde Reformasi — 97

PENELITIAN

ISMATU ROPI

Rohis: Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama — 114

NURUS SHALIHIN DJAMRA

Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: Dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional — 126

BOOK REVIEW

MEILANI DEWI

Mengurai Pemikiran Haikal tentang Negara Islam — 140

KEGAGALAN PARTAI POLITIK ISLAM : KEGAGALAN AGENDA SETTING ?

OLEH : MUHAMMAD HIMAWAN SUTANTO

Pengajar Komunikasi Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK :

In recent years, the failure of Islamic political parties in Indonesia has occurred as result of inability to make a good agenda setting. To solve this problem, this article highlights the importance of the pattern of political communication (including the communicator, message, media, communicant and its effects) for Islamic political parties. It must be a serious concern in arranging the agenda setting. The agenda setting must be based on the voters aspiration and rational values. By these ways, Islamic political parties will be independence from their big names (such as NU for National Awakening Party (PKB), Muhammadiyah for Mandate National Party (PAN)).

Beberapa tahun terakhir ini, kegagalan partai-partai politik Islam di Indonesia terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuannya untuk membuat agenda setting yang baik. Untuk memecahkan masalah tersebut, artikel ini menggarisbawahi pentingnya pola komunikasi politik yang baik (termasuk komunikatornya, pesan, media, komunikan dan efek-efeknya) bagi partai politik Islam. Pola komunikasi politik menjadi penting dalam penyusunan agenda setting. Agenda setting harus berbasiskan pada aspirasi pemilih dan nilai-nilai yang rasional. Dengan cara-cara ini partai politik Islam bisa terbebaskan dari nama besarnya (seperti NU untuk PKB dan Muhammadiyah untuk PAN).

KATA-KATA KUNCI:

Partai politik Islam, komunikasi politik, agenda setting

Pendahuluan

Disamping menjadi kekuatan teologis, Islam mempunyai kekuatan sosiopolitik yang cukup signifikan. Hal ini bisa dijelaskan dengan berbagai macam fenomena sosial politik yang berkembang, baik secara regional maupun internasional. Potensi yang kuat ini kadang melahirkan banyak multitafsir yang bisa mengembangkan Islam menjadi sangat sempit dan tidak rasional. Aspek sosiopolitik lebih mendominasi tafsir yang muncul dibanding tafsir budaya dan lainnya. Padahal secara budaya, Islam juga menjadi salah satu bentuk kekuatan yang tidak lemah. Setidaknya sampai sekarang budaya Islam masa lalu masih menjadi tradisi yang melingkupi ratusan juta umatnya.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, setidaknya ikut memberikan kontribusi terhadap keberadaan budaya Islam yang khas di Asia Tenggara. Dalam konteks inilah Islam menjadi suatu konsep yang sedikit berbeda dengan konsep di Timur Tengah. Islam membaur dengan budaya lokal yang kemudian melahirkan tradisi-tradisi *sinkretisme* yang kental. Akulturasi budaya-agama ini melahirkan sikap dan perilaku keberagamaan yang beragam. Sikap perilaku dalam keberagamaan mau tidak mau masuk dalam proses kehidupan sehari-hari juga. Termasuk didalamnya adalah sikap berpolitik.

Dalam kajian sosiologis, agama yang kemudian termanifestasikan dalam konteks perilaku sehari-hari memungkinkan lahir kesadaran kolektif (*collective conscience*). Agama ketika sudah menjadi kesadaran kolektif maka perilaku manusia mau tidak mau

bisa mencerminkan tafsir atas agama yang dianut. Agama akhirnya menjadi justifikasi atas apa yang menjadi perilaku manusia. Sikap politik yang lahir pun bisa merupakan representasi dari sikap keberagamaan. Budaya yang lahir tidak luput juga melahirkan sikap dan perilaku dalam berpolitik. Nilai Islam di Indonesia adalah sesuatu nilai yang unik yang berbeda dengan konsep di Timur Tengah. Politik aliran menjadi salah satu konsep yang kemudian banyak dikembangkan sebagai analisis untuk mengamati perilaku politik –terutama partai politik Islam di Indonesia.

Partai politik adalah alat dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan legitimasi rakyat sebagai bagian dari partisipasinya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep politik demokrasi, partai politik menjadi bagian yang cukup menarik untuk dikaji secara spesifik. Sejak Orde Lama Partai politik Islam telah mendapat posisi yang cukup signifikan dalam percaturan politik di Indonesia. Pasca pemilu tahun 1955, partai politik Islam mendapatkan tantangan yang kuat dari sikap politik Presiden Soekarno yang cenderung memaksakan diri untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan kemudian mengeluarkan dekrit. Sejatinya, pemilu tahun 1955 adalah pemilu yang cukup demokratis, dimana hasil pemilu menunjukkan pertarungan antar partai politik sebagai peserta pemilu yang cukup sengit dan saling bersaing. Namun dalam kenyataannya hasil pemilu 1955 tidak mampu membuat pondasi kenegaraan yang kuat sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap hasil sementara dalam kondisi yang darurat.

Hasil Pemilu Tahun 1955

| Partai Politik | Prosentase Suara | Jumlah Kursi |
|----------------|------------------|--------------|
| PNI | 22.3 | 57 |
| Masyumi | 20.9 | 57 |
| NU | 18.4 | 45 |
| PKI | 16.4 | 39 |
| PSII | 2.9 | 8 |
| Parkindo | 2.6 | 8 |
| Partai Katolik | 2.0 | 6 |
| PSI | 2.0 | 5 |
| Partai lain | 12.5 | 32 |
| Total | 100 | 257 |

Sumber : diolah dari Feith (1999)

Partai politik Islam kemudian banyak yang tiarap dengan kebijakan tersebut apalagi setelah Masyumi kemudian dibubarkan oleh Soekarno. Masa itu berlangsung cukup lama dimana partai politik Islam baru mendapatkan peluang (walaupun kecil) setelah orde lama tumbang dan orde baru hadir. Dalam kondisi multi partai (*multiparty systems*) secara tradisional akan memberikan konsekuensi lemahnya produktivitas kerja, pemerintahan yang tidak stabil, disamping itu juga muncul kelemahan akuntabilitas dalam system pemilunya (Hague, Harrop, Breslin : 1998)

Orde baru tidak memberi peluang yang baik dalam proses demokrasi, walaupun orde baru menegaskan sebagai system politik yang demokratis dengan Demokrasi Pancasila. Tetapi pada kenyataannya orde baru malah melakukan penyederhanaan terhadap partai politik. Dari puluhan partai yang ikut dalam pemilu tahun 1955, oleh orde baru kemudian disederhanakan menjadi tiga partai saja. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah hasil merger dari Parmusi, PSII dan Perti. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

adalah merger dari PNI, Parkindo, Murba, IPKI, Partai Katolik). Dan hasil setiap pemilu sangat mudah ditebak partai apa yang menang pemilu.

Hasil Pemilu Tahun 1971 - 1997

| | 1971 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1997 |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Golkar | 62.8 | 62.1 | 64.2 | 73.2 | 68.1 | 74.5 |
| PPP | 27.1 | 29.3 | 28 | 16 | 17 | 22.4 |
| PDI | 10.1 | 8.6 | 7.9 | 10.9 | 14.9 | 3.1 |

Orde baru menunjukkan klaim bahwa kondisi politik aman tetapi partai dikerdilkan oleh pemerintahan orde baru. Tatanan politik orde baru sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orde lama, dalam artian ada proses penghambatan akan kemajuan partai-partai politik. Dan utamanya partai politik dengan basis massa yang jelas. Orde lama menggunakan Dekrit untuk menekan keberadaan partai politik Islam yang jelas mempunyai massa yang riil. Begitupun juga dengan orde baru yang memfusikan partai politik ke dalam dua partai politik semata. Sehingga dalam perkembangannya tidak semua aspirasi dan partisipasi politik partai Islam pada masa orde lama bisa dikembangkan secara lebih baik.

Transisi Menuju Demokrasi Indonesia

Pasca runtuhnya orde baru, perkembangan politik Indonesia mengalami kondisi yang cukup signifikan dalam arti kebebasan dalam partisipasi politik. Keterbukaan informasi dan perkembangan politik yang membuka peluang pada semua lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dari Negara Indonesia melahirkan euphoria politik yang tidak terbendung. Pentas politik seolah-olah menjadi satu-satu-

nya fenomena perubahan negara dan bangsa.

Kegagalan dalam perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi bagian isu yang tidak terbantahkan dalam kondisi politik yang tidak terkendali. Masyarakat yang kalut dalam ketidakjelasan memaksakan diri untuk bisa masuk dalam pusaran politik tanpa adanya modal politik yang kuat. Dalam teorisasi politik transisi menuju demokrasi. Ketidakpastian politik, ekonomi dan social adalah konsekuensi yang patut dihadapi. Paling tidak bisa dilihat bagaimana “proyek-proyek demokrasi” negara Barat di kawasan Timur Tengah dan Afrika selalu meninggalkan prahara perang saudara yang terus berkepanjangan. Dan proyek itu tidak pernah selesai dengan manis dan anggun. Agak berbeda dengan Indonesia, terlepas apakah reformasi politik tahun 1998 adalah “proyek demokrasi” atau tidak setidaknya perang saudara tidak sampai terjadi secara berkepanjangan. Inilah menariknya budaya politik di Indonesia.

Transisi demokrasi di Indonesia tetap melahirkan goncangan yang tidak sedikit merugikan masyarakat luas. Tetapi tidak serta merta melahirkan konflik berkepanjangan dalam mata rantai politik. Pasca pemilu 1999, BJ Habibie mampu mengendalikan kondisi ekonomi dan keamanan dengan cukup baik. Menariknya pada masa itu mulailah muncul kelompok-kelompok paramiliter atau kelompok berbasis agama yang digunakan untuk mengamankan kondisi politik yang terjadi. Bagi kelompok ini seolah-oleh BJ Habibie adalah representasi politik Islam. Setidaknya karena Habibie adalah Ketua Umum ICMI.

Pemilu tahun 1999 seolah-olah ingin mengulang kesuksesan pemilu 1955 dimana partai Islam mendapatkan posisi yang cukup signifikan. Tetapi para penggagas partai Islam sepertinya tidak memperhatikan tentang aspek sosial politik yang kemudian berkembang selama masa orde baru. Paling tidak selama hampir tiga decade orde baru melakukan proses cuci otak yang cukup kuat dan membangun wacana yang kuat untuk menjauhkan agama dari aspek politik. Hasilnya perkembangan politik Islam sudah jauh dari sejarah pada masa politik liberal. Politik aliran yang berkembang sudah jauh dari gagasan Islam sebagaimana pada masa orde lama. Apalagi political will pada masa orde baru melakukan penegasian terhadap semua hal yang berbau orde lama. Sehingga seolah-olah orde lama sebagai sejarah kelam yang perlu ditinggalkan. Strategi wacana orde baru cukup signifikan dalam setting mind dari rakyat Indonesia pada masa orde baru. Dengan ancaman nilai-nilai subversiv, orde baru menjauhkan rakyat dari ideology orde lama.

Represifitas atas nama negara digunakan orde baru untuk mengamankan proses hegemoni dan dominasinya. Dalam aspek ini orde baru menggunakan pendekatan yang cukup signifikan baik dari sisi represifitas maupun sisi wacana. Kemampuan membangun strategi wacana (*discursive strategy*) menunjukkan bagaimana hegemoni yang terbentuk sangat kuat. Strategi wacana ini yang nampaknya belum mampu membuat perubahan yang signifikan dalam perubahan pemilih.

Jumlah partai politik yang teregistrasi untuk pemilu tahun 1999. Tetapi setelah dilakukan screening, jumlah

tersebut kemudian menyusut menjadi 48 partai politik yang ikut pemilu pada bulan juni tahun 1999. Dari partai politik yang lolos kualifikasi, ada beberapa partai politik Islam yang mengusung ideology lama dan ada yang melakukan revisi terhadap ideology tersebut dan lebih terbuka. PBB (Partai Bulan Bintang) mencoba menggunakan isu-isu lama dan ideology Masyumi untuk mendapatkan suara dari voter. PBB nampaknya masih berharap banyak dari romantisme politik masa lalu yang sedang keluar dan membara setelah kejatuhan politik orde baru. Strategi ini sebenarnya cukup menarik tetapi PBB tidak memperhatikan jarak waktu yang cukup lama antara periode tahun 1955 dengan 1999, dimana dalam rentang masa itu sudah banyak terjadi hal yang secara signifikan mempengaruhi perilaku politik rakyat Indonesia. PK (Partai Keadilan) sebagai pendatang baru juga belum mempunyai taring yang kuat untuk ikut meramaikan politik praktis pada tahun 1999. Tetapi kondisi ini mengalami perubahan yang cukup kuat pada periode pemilu berikutnya.

| Partai | Prosentase Hasil 1999 | Prosentase Hasil 2004 | Prosentase Hasil 2009 |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Golkar | 22.5 | 21.6 | 14.45 |
| PDIP | 33.8 | 18.5 | 14.03 |
| PKB | 12.6 | 10.6 | 4.94 |
| PPP | 10.7 | 8.2 | 5.32 |
| PD | - | 7.5 | 20.85 |
| PK (PKS) | 1.4 | 7.3 | 7.88 |
| PAN | 7.1 | 6.4 | 6.01 |
| PBB | 1.9 | 2.6 | 1.79 |
| PBR | - | 2.4 | 1.21 |
| PDS | - | 2.1 | 1.48 |
| Gerindra | - | - | 4.49 |
| Hanura | - | - | 3.77 |
| PKNU | - | - | 1.47 |

Perilaku pemilih (*voting behavior*) Indonesia bisa dijelaskan setidaknya dengan hasil pemilu sejak 1999. Dimana dominasi partai nasionalis – untuk tidak mengatakan sekuler – sangat solid, hal ini bisa menjadi indicator bahwa partai politik Islam belum bisa menjadi idola yang cukup menarik bagi rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kondisi ini bisa jadi sebuah anomaly dalam masyarakat dunia ketiga yang mayoritas Islam tetapi tidak memilih partai Islam sebagai rujukan politiknya. Artinya ada banyak kondisi dan hal yang memungkinkan pemilih untuk tidak memilih partai politik Islam. Hemat penulis ada kondisi yang kurang sesuai antara idealism partai dengan realitas yang diharapkan masyarakat.

Bila kita menilik kondisi masyarakat Indonesia yang sangat komunal dan tradisional, maka bisa jadi ada kesenjangan komunikasi politik yang gagal membaca kepentingan masyarakat. Harapan masyarakat akan lahirnya Islam yang mensejahterakan ternyata tidak sesuai harapan mereka. Tetapi kemudian yang terjadi adalah eksploitasi umat demi kepentingan politik praktis semata. Umat diiming-imingi janji-janji yang tidak pernah ditepati. Komunikasi politik sendiri hanya dihargai sebagai usaha komunikatif untuk kepentingan meraih kekuasaan semata, bukan sebaliknya komunikasi politik difahami juga sebagai bentuk penyerapan aspirasi rakyat tentang idealism politik yang mensejahterakan.

Selama ini posisi opinion leader dianggap sebagai salah satu mesin penggerak rakyat untuk memilih partai politik. Gaya opinion leader ini nampaknya harus mulai

dipertimbangkan lagi. Keterbukaan informasi dan ekonomi memungkinkan munculnya aspek-aspek lain seperti media massa untuk mensupport informasi voter. Mesin politik tidak serta merta bisa dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkan untuk bisa mendapatkan voter. Dalam mekanisme politik, komunikasi sebagai salah satu pokok dalam meraih dan mempertahankan posisi. Nampaknya partai politik Islam tidak terlalu mementingkan konsep komunikasi politik yang signifikan dan memberikan pencerahan. Konsep komunikasi politik yang selama ini dikembangkan masih berupa komunikasi politik konvensional dengan memposisikan subyek-obyek dengan voter. Relasi ini nampaknya perlu dikritik lebih jauh.

Dalam konteks transisi demokrasi, menurut O'Donnell dan Schmitter (1993) sejumlah aturan-aturan dikembangkan secara efektif dan dalam genggamannya otoriter. Kondisi ini sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan kekuasaan sewenang-wenang untuk menentukan aturan-aturan dan hak-hak, dimana dalam system demokrasi hal tersebut umumnya dilindungi dalam peraturan. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kondisi liberalisasi. Semua aspek kepentingan politik bisa bertarung secara terbuka. Para *die hard* otoritarianisme masih kuat mempertahankan ideologi mereka, begitu juga dengan para pembela demokrasi, mereka juga sekuat tenaga mempertahankan ideologi mereka. Dalam kondisi "perang" terbuka ini yang kemudian tidak bisa ditinggalkan begitu saja adalah proses komunikasi politik di dalamnya. Masing-masing kubu akan menggunakan kesem-

patan yang sebaik-baiknya untuk menyampaikan pesan yang bisa memikat hati rakyat atau konstituen. Dalam hal ini bisa dibaca dengan banyaknya muncul partai-partai politik Islam baru yang mencoba mengusung tema-tema baru.

Partai politik Islam sebenarnya tidak terlalu banyak mengalami perubahan secara signifikan. Setidaknya ada lima partai politik yang mempunyai praksis aliran dengan Islam : PPP, PKB, PAN, PKS, PBB. PPP adalah partai yang tidak lepas dari orde baru. Partai ini hasil fusi dari beberapa partai politik Islam pada awal orde baru berjalan. PBB masih menempatkan diri sebagai partai yang berafiliasi dengan masa lalu yaitu Masyumi yang sebenarnya sudah tidak mempunyai kadar politik yang kuat lagi di kalangan voter sekarang. Bisa jadi mereka sudah tidak faham dengan karakter politik dari Masyumi. PAN setidaknya menjadi ajang politik dari organisasi massa Muhammadiyah. Walaupun tidak secara langsung mengakui PAN sebagai wadah politik tetapi hampir dipastikan bahwa Muhammadiyah menjadi salah satu mesin politik dari PAN. Begitu juga PKB, yang dibidani oleh Gus Dur, bedanya PKB mengakui secara terang sebagai anak kandung NU. PKB mengklaim sebagai partai yang sekuler walaupun jelas mengandalkan gerakan NU sebagai mesin politiknya. Sedikit berbeda adalah kehadiran PKS dimana mereka lahir dari lembaga dakwah kampus yang kemudian membuat partai politik yang mengaku sebagai Islam modernis. PBB adalah partai pecahan dari PPP.

Secara ideology partai Islam Indonesia juga tidak dalam satu pemahaman yang sama. PPP mempunyai perpaduan

antara Islam tradisional dan modernis. PKB lebih kepada tradisional Islam yang moderat. PAN adalah Islam moderat. PKS adalah Islam modernis. PBR kurang lebih sama dengan PPP. Dan, PBB adalah Islam modernis yang berafiliasi dengan Masyumi. Rencana aksi yang ditawarkan oleh partai politik Islam belum menyentuh kepentingan politik umat. Hal ini bisa dilihat bahwa kecenderungan pemilih masih didasari oleh primordialisme organisasi induk yang menjadi rujukan partai politik.

Demokrasi dan Proses Komunikasi Politik

Partai politik Islam masih menunjukkan ketidakmandirian dalam mendulang suara di kalangan rakyat yang berbeda. Sebagai contoh PAN dan PKB masih mengandalkan nama besar Muhammadiyah dan NU untuk mendapatkan kursi di legislative. Begitu juga dengan partai-partai yang lain, mereka masih belum berani menempatkan diri secara lebih terbuka kepada masyarakat lain untuk memilih partai Islam. Ada kekacauan dalam menafsirkan bagaimana suatu partai politik mendapatkan suara dari pemilih. Gaya komunikasi politik yang konvensional dan bersifat top down masih menjadi alat utama untuk membidik voter. Artinya partai politik enggan menggunakan media lain untuk mendulang suara kecuali nama besar ormas rujukan atau romantisme masa lalu. Seharusnya hal ini sudah ditinggalkan digantikan dengan isu-isu yang lebih praktis yang bisa menjadi perhatian voter.

Dalam studi-studi ilmu politik, komunikasi politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjelaskan tentang fenomena proses politik. Ahli

ilmu politik menjelaskan tentang konsep politik sebagai suatu bentuk konsep yang sirkuler atau terus berhubungan antara input politik, konversi dan output politik. Komunikasi politik partai-partai politik di Indonesia masih terjebak dengan model konvensional komunikasi yang selalu menegaskan bahwa rakyat membutuhkan partai politik dan bukan sebaliknya. Sikap ini bisa dipahami karena ketergantungan yang cukup lama oleh rakyat terhadap partai politik.

Komunikasi politik dalam sebuah proses politik layaknya aliran darah dalam tubuh manusia. Dimana dia akan memberikan informasi, berita dan pesan-pesan politik untuk menjalankan proses politik dengan baik (Alfian:1993). Apabila konsepsi yang diajukan Alfian tersebut digunakan sebagai alat analisis, maka sangat mungkin terlihat bagaimana proses politik di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik. Proses komunikasi politik hanya berjalan ketika akan terjadi pemilu dan pilkada semata. Setelah itu maka komunikasi politik akan dengan sendirinya hilang. Gabriel Almond menjelaskan politik seperti layaknya kotak tempat masuknya berbagai macam tuntutan dan dukungan untuk mempengaruhi system politik. Output yang dihasilkan adalah kebijakan-kebijakan system politik – baik sesuai atau tidak dengan masukan system politik. Artinya komunikasi politik bisa mengalir dari rakyat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat. Dalam hal ini ada banyak medium yang dipakai dalam proses tersebut.

Seorang ahli politik ternama Amerika Serikat, Harold D. Laswell mendefinisikan komunikasi dalam pendekatan ilmu politik sebagai

who, says what, to whom and with what effect (siapa, mengatakan apa, kepada siapa dan dengan efek seperti apa). Pandangan ini menekankan pada aspek linier system komunikasi politik. System ini memposisikan kepada bagaimana hegemoni media atau penguasa pesan untuk mempengaruhi rakyat atau public. Pendekatan yang ditawarkan oleh Laswell sampai saat ini masih menjadi salah satu konsep yang menarik untuk menganalisis proses komunikasi politik. Pandangan ini masih dikuasai oleh dasar filosofi relasi subyek-obyek dalam berkomunikasi. Relasi ini akan selalu memposisikan satu pihak sebagai penguasa pesan atau subyek dan pihak lain sebagai yang dikenai pesan obyek. Hubungan ini tidak sejajar dan tidak seimbang. Sikap ini bisa tercermin dalam kondisi politik saat ini. Bagaimana politik Indonesia memposisikan rakyat masih sebagai obyek semata dan belum menjadi partner yang sejajar.

Proses politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh sikap budaya politik yang menegaskan sikap yang belum demokratis. Relasi subyek-obyek pada komunikasi politik bahkan dalam proses politik semakin menegaskan akan gagalnya proses system politik yang diharapkan. Relasi yang tidak sesuai ini bisa menumbuhkan sikap apatisisme berpolitik. Karena yang ada hanyalah eksploitasi obyek – dalam hal ini rakyat – oleh partai politik sebagai subyek. Relasi subyek-obyek dalam tradisi system demokrasi bukan lagi hal yang diidealkan. Demokrasi mensyaratkan tiga hal setidaknya yaitu konstitusional, partisipasi, dan pilihan rasional (McNair: 2003). Tiga hal ini adalah spirit untuk membangun proses komunikasi politik yang sehat.

Konstitusionalitas (*constitutionality*) adalah usaha untuk menyetujui penempatan prosedur dan aturan yang digunakan untuk melakukan pemilihan umum. Hal ini terkait dengan perilaku atas legitimasi bagi mereka yang menang dan mereka yang kalah dalam pemilu. Artinya kesepakatan dalam membuat aturan pemilu digunakan untuk membuat keteraturan yang baik dalam mempersiapkan pemerintahan yang berkuasa kelak.

System politik yang berjalan di Indonesia masih jauh dari kondisi penegakan hukum yang kuat. Pemilu masih sangat rawan diintervensi oleh kepentingan politik sesaat. Komisi Pemilu Umum masih memiliki masalah diberbagai macam kondisi. Mulai dari system penghitungan yang tidak sesuai harapan dan kredibilitasnya yang perlu dievaluasi. Hal ini bisa terbukti setidaknya oleh beberapa kasus komisioner yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Misalkan mulai dari kasus Syamsul Bahri dan berikutnya kasus Andi Nurpati. Pada tahapan ini Nampak bagaimana sisi profesionalitas yang berbasis hukum tidak menjadi perhatian utama. Hukum masih menjadi alat permainan kepentingan politik sesaat.

Partisipasi (*participation*) menegaskan tentang partisipasi rakyat ikut serta dalam proses politik. Disinilah proses ini sebenarnya menjadi substansi dari proses politik. Dalam kajian ilmu politik, inti proses yang demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam proses politiknya. Maka menjadi sangat penting hubungan antara partai politik dan rakyat dalam proses ini. Apabila syarat ini tidak bisa dikembangkan maka proses demokrasi agak mengalami kelambatan dalam perkembangannya.

Pilihan yang rasional (*rasional choice*) adalah ketika rakyat diberikan kemandirian memilih partai atau perwakilannya dalam proses politik yang demokratis. Pilihan ini tentunya tidak semata-mata karena hal yang bersifat primordial tetapi lebih menekankan kepada tingkat pengetahuan dan rakyat yang mempunyai tingkat pendidikan yang baik, terutama kesadaran politik.

Merancang isu adalah hal yang penting dalam mengkondisikan partai politik Islam agar mendapat posisi yang baik lagi. Perlu *breakthrough* untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan harapan partai. Dalam kondisi negara yang sudah demokratis atau setidaknya sudah memasuki transisi demokrasi, maka wajib bagi partai politik untuk mengikuti irama demokrasi. Artinya jangan menutup diri dengan kepentingan partai secara sempit tetapi juga menempatkan diri sebagai pendengar dan penyimak yang baik terkait dengan agenda-agenda voter. Karena dalam kondisi demokratis, voter mempunyai posisi tawar yang lebih. Jaminan sebagai warga negara dan mempunyai hak untuk berpartisipasi adalah salah satu kondisi yang mengharuskan partai politik untuk melakukan revisi terhadap program dan kampanye yang mereka akan lakukan.

Komunikasi politik partai Islam di Indonesia belum mampu menjadi suatu yang dianggap penting sebagai modal di pemilu yang akan datang. Komunikasi yang terputus-putus hanya akan mengurangi voter. Karena hal itu menunjukkan ketidakseriusan partai politik Islam dalam menangkap aspirasi politik voter. Bisa jadi hal tersebut karena system demokrasi yang berjalan di Indonesia belum menjadi

peluang untuk dipijak jauh ke depan. Primordialisme agama masih belum cukup untuk dibawa ke ranah politik tetapi partai politik Islam harus mampu menangkap *political practice agenda* dari voter Islam.

Paradoks Demokrasi

Para sarjana ilmu politik masih mempercayai bahwa pemilu masih menjadi standar bagaimana sebuah system demokrasi terukur Dahl (1985), Sundhaussen (1992). Pada posisi ini juga partai politik mendapatkan legitimasi yang kuat atau tidak. Menariknya partai politik Islam tidak mampu dan berani menampilkan diri untuk membahas isu-isu kerakyatan. Pemilu adalah era dimana system pasar pesan politik dibuka dengan luas. Dimana masing-masing partai bisa menawarkan pesan-pesan politik yang bisa berkembang secara luas. Momen pemilu adalah situasi yang pas dalam memoles diri dalam mendapatkan voter dan legitimasi yang kuat secara politik. Tetapi hal ini kadang tidak disiapkan dengan baik oleh partai politik untuk menawarkan isu-isu yang menarik.

Manajemen isu adalah salah satu konsep yang penting untuk dipertimbangkan dalam memainkan strategi wacana untuk mendapatkan voter secara baik. Isu disini tidak mengharuskan isu-isu politik praktis semata tetapi juga isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan voter secara umum. Selama ini yang terjadi manajemen isu partai politik Islam masih terjebak dalam model top-down. Partai masih dianggap sebagai yang tahu segalanya tentang masalah voter. Sehingga sikap elitis ini yang kemudian menjadi boomerang kepada

partai itu sendiri. Praktek Perda Syariah menjadi contoh yang kontroversial, pemaksaan atas pemberlakuan perda syariah ini menunjukkan adanya sikap elitis dan sok tahu dari partai politik yang terepresentasikan dalam politik pemerintahan. Perda syariah hanya menjadi komoditas politik sementara tetapi tidak memberikan solusi terhadap kebutuhan voter/umat secara umum. Perda syariah hanya menjadi alat kepentingan penguasa untuk mendapatkan nama tetapi tidak ada keuntungannya kepada umat secara umum. Kecenderungan pelaksanaan perda syariah menekan kepada nilai-nilai hak asasi manusia, tafsir tunggal atas perilaku umat sangat membahayakan. Perda syariah ini hanya akan melahirkan ketakutan-ketakutan baru dari system demokrasi. System ini hanya membungkus gaya otoritarianisme baru dengan nilai-nilai demokrasi. Perda-perda itu hanya melahirkan diskriminasi kepada keyakinan dan tafsir yang lain. Dan hal ini sangat mengancam *Bhineka Tunggal Ika* yang selama ini menjadi *kredo* Bangsa Indonesia. Perda syariah tersebut mengancam kebebasan sipil, terutama kebebasan dalam beragama (Fauzi dan Mujani:2009). Hal ini berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menegaskan kepada kebebasan (*freedom*), kemerdekaan (*liberty*) dan penegakan hak-hak sipil (*right*). Kemerdekaan yang menjadi esensi terbagi menjadi beberapa macam : *right to vote, freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, freedom of religion, freedom of movement, freedom from arbitrary treatment by political and legal system* (Sargent :1990). Praktek dari perda syariah itu sendiri dalam beberapa hal bertentangan dengan

system demokrasi yang dipakai.

Paradoks antara spirit demokrasi dengan penerapannya di Indonesia menjadi menarik. Hal ini karena terjadi proses dehumanisasi didalamnya, padahal demokrasi adalah membangun spirit untuk mementingkan system yang lebih humanis. Praktek demokrasi ini tidak lepas dari spirit romantisme masa lalu yang selalu mempunyai keinginan untuk menerapkan syariah Islam di dalam pengelolaan negara Indonesia sebagai representasi dari negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia. Klaim-klaim representative inilah yang berbahaya karena dalam kenyataannya umat Islam sendiri tidak dalam satu suara untuk menafsirkan praksis politiknya.

Menariknya dalam kasus-kasus ini partai politik Islam yang mengaku sebagai modernis dan moderat tidak bisa berbuat banyak. Kadang mereka menggunakan hal tersebut juga sebagai salah satu cara mendapatkan perhatian untuk mencuri hati voter. Tetapi hal itu hanya menjadi bagian yang salah dalam tafsir memikat voter.

Rasionalisasi Komunikasi Politik

Dalam kajian komunikasi politik perlu diperhatikan juga adanya perilaku-perilaku pemilih (*voter behavior*), pemilih mempunyai pandangan dan sikap yang berbeda seiring dengan perkembangan system social dan media massa yang lebih terbuka. Sebenarnya dengan keterbukaan dalam informasi dalam demokrasi, memberi peluang positif kepada partai politik untuk mawas diri dan lebih bersikap aktif. Karena pada kondisi seperti itu rakyat lebih rasional dibanding pada kondisi yang otoriter. Media menjadi alat yang

masih ampuh untuk memahami kondisi voter dan meraihnya dengan baik. Gaya memilih rasional (*rational choice*) mulai muncul dan menanggalkan gaya memilih primordialis. Islam masih menjadi magnet yang luar biasa, tetapi dalam konsep praktek politik mungkin perlu dipertimbangkan secara lebih jauh. Gaya komunikasi politik selama ini mengandalkan kekuatan pemuka pendapat (*opinion leader*) dari para kyai dan ustad. Padahal dalam perkembangannya mulai muncul penegasian terhadap kredibilitas politik para pemuka pendapat tersebut. Secara praktek agama mereka mempunyai kredibilitas yang kuat tetapi dalam praktek politik nampaknya mereka masih menjadi pertanyaan besar. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kyai dan ustad yang dalam praktek politik kemudian terjatuh dalam tindak korupsi atau perilaku yang menyimpang dari agama.

Manajemen komunikasi politik Partai Islam masih belum mengembangkan isu-isu yang berani menentang sikap politik secara umum. Misalkan mendukung ekonomi kerakyatan dengan diikuti penawaran system yang lebih jelas. Dalam hal ini bukan sekedar isu belaka tetapi ada aksi yang bisa menjadi contoh untuk ditawarkan ke voter. Perilaku elitis menjadi salah satu problem dalam komunikasi politik partai-partai Islam. Sikap ini tidak jauh juga dari sikap partai politik yang lain. Pola komunikasi politik yang cenderung tidak sama akan melahirkan kekecewaan-kekecewaan semata bagi rakyat.

Voter memiliki kepekaan yang kuat untuk menentukan pilihan sebagaimana preferensi mereka tentang pilihan yang sesuai. Politik aliran sebagaimana yang

digemborkan selama ini mengalami tantangan dengan perubahan social budaya yang berkembang dengan cepat. Tehnologi komunikasi membawa voter kepada pilihan-pilihan politik yang rasional berdasar informasi yang didapatkan.

Keterbukaan informasi ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh partai politik. Kesadaran politik voter secara perlahan akan mengalami perkembangan yang positif. Tetapi disisi partai politik tetap kukuh dengan tingkah laku yang sok tahu dan sok paham keresahan voter. Modernisasi partai politik masih lemah. System kepartaian yang kurang terbuka dan mengedepankan ketokohan seseorang menjadi ganjalannya. Lihatlah PKB yang dahulu mengedepankan nama besar almarhum Gus Dur, PAN dengan nama besar Amien Rais dan Muhammadiyah. PPP dengan nama besar NU. Diantara partai politik Islam tersebut hanya PKS yang tidak mengedepankan nama besar tetapi jaringan dakwah. Permasalahannya adalah PKS tidak mempunyai basis massa secara sosiologis yang kuat dengan budaya Indonesia.

Mayoritas umat Islam bukanlah hal yang meyakinkan bahwa mereka akan memilih sesuai dengan identitas agama. Tetapi ada identitas-identitas lain yang lebih penting. Dalam pandangan sosiologis ada *significant others* secara politis yang mempengaruhi pilihan. Salah satu hal yang penting adalah mengajak voter untuk melakukan sikap politik yang rasional. Demokrasi menegaskan bahwa rasionalitas adalah hal utama dalam berpolitik. Mitos-mitos yang tidak bisa diyakini secara rasional sebaiknya ditinggalkan oleh partai politik. Karena demokrasi mengajak

rakyat untuk menjadi lebih dewasa dalam menentukan sikap politiknya. Pilihan tersebut akan berefek kepada jalannya pemerintahan jauh ke depan.

Agenda Setting Partai Politik Islam

Menghindari kegagalan dan stagnasi partai politik Islam, maka perlu rekomendasi tentang pola komunikasi politiknya. Penyusunan agenda (*agenda setting*) menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam komunikasi politik perlu diperhatikan adalah aspek-aspek didalamnya. Mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Pertama komunikator, dalam komunikasi politik perlu memilih komunikator dengan kredibilitas yang kuat dan bermoral. Artinya rujukan agama tetap menjadi acuan yang bisa dipakai untuk memilih komunikator. Sebagai partai yang berlandaskan nilai—nilai agama maka komunikator dilihat sebagai umpan yang cukup menarik untuk dipilih oleh voter. Komunikator dalam hal ini bisa mereka para politikus, para professional, aktivis politik (Nimmo : 2000). Mereka bisa menjadi umpan yang menarik para voter.

Komunikator adalah aspek penting dalam menawarkan program politik. Kemampuan persuasive mereka adalah salah satu kunci mendapat posisi yang bagus untuk capaian politik partai. Dalam konteks partai Islam, nampaknya perlu dipilih komunikator yang bukan hanya berbasis agama tetapi mereka-mereka yang dianggap professional dalam bidangnya dan mampu memberikan program-program yang solutif kepada masyarakat.

Disamping sebagai penyampai informasi dari partai ke voter,

komunikator juga menjadi bagian penyerap aspirasi politik voter. Dalam hal ini mereka tidak boleh tidak menjadi pendengar yang tidak egois dengan kepentingan politiknya. Mereka adalah *Public Relations* (PR) politik yang menjadi garda depan kampanye dan saluran komunikasi politik. Sehingga bukan hal yang mudah ketika seseorang diminta masuk ke dalam partai politik.

Komunikasi politik tidak selalu diidentikkan dengan usaha komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan kepada kandidat atau program semata. Tetapi juga menjadi bagian penyerapan aspirasi oleh partai politik. Maka sangat penting untuk memilih agenda yang ingin disampaikan, dimana agenda itu mempunyai relasi yang kuat dengan agenda voter. Apabila hal ini terjadi, maka proses politik akan berlangsung dengan lebih demokratis.

Kedua, pesan politik menjadi hal yang penting karena itulah inti yang ingin disampaikan kepada voter untuk kemudian dijadikan pertimbangan. Dalam konsep komunikasi, partai politik perlu memilih agenda yang ingin disampaikan ke voter. Disinilah perlu pembentukan agenda (*agenda setting*) secara baik. Partai harus mampu memilih tema-tema apa yang bisa menjadi pembicaraan umum bagi voter dan menarik perhatian.

Walter Lippman menegaskan bahwa masyarakat tidak merespon kejadian yang ada dalam lingkungannya. Tetapi mereka akan merespon kepada “gambaran dalam kepala kita” atau yang lebih disebut dengan lingkungan palsu (*pseudoenvironment*) (Little John & Foss : 2009). Hal ini terjadi karena lingkungan yang sebenarnya sangatlah kompleks terlalu besar dan menuntut

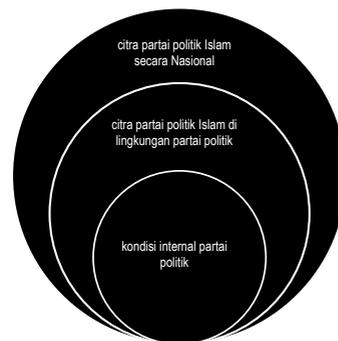
kontak langsung. Donald Shaw dan Maxwell MCombs menjelaskan bahwa penyusunan agenda terjadi karena media harus selektif dalam melaporkan berita. Ada dua tingkat penyusunan agenda, pertama menentukan isu-isu umum yang dianggap penting. Kedua, menentukan bagian atau aspek dari isu-isu tersebut yang dianggap penting. Partai politik harus bisa menggunakan divisi-divisi penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan agenda apa yang bisa disusun sebagai komoditas politik yang bisa diterima dengan baik oleh voter.

Memilih media juga menjadi bagian yang penting dalam komunikasi politik. Media akan sangat berhubungan dengan budaya rakyat. Kesalahan media akan berakibat fatal kepada voter. Kemajemukan Indonesia adalah tantangan terbesar yang tidak bisa dianggap remeh. Aspek geografis, psikografis dan sosiografis menjadi rujukan-rujukan yang penting dalam memilih media untuk menyampaikan informasi. Voter dengan latar belakang pedesaan akan berbeda dengan voter dengan latar belakang perkotaan dalam mengkonsumsi media. Latar belakang pendidikan, suku, agama, organisasi juga ikut menentukan aspek perilaku politik. Maka sangatlah mungkin partai politik Islam memasuki ranah yang bukan salah satu agendanya. Tetapi dari agenda yang baru itu memunculkan kesempatan mendapatkan suara dari wilayah yang lebih inklusif.

Disamping penyusunan agenda yang baik dan demokratis, yang lebih utama juga adalah stabilitas internal partai. Dalam konsepsi PR politik menjadi penting untuk melakukan konsolidasi internal dalam menghadapi proses politik. Karena

tidak menutup kemungkinan sebuah partai juga mengalami kondisi kegagalan konsolidasi. Ini bisa dilahirkan karena adanya kepentingan-kepentingan individual yang secara sepihak menggunakan partai untuk kepentingan politik praktisnya.

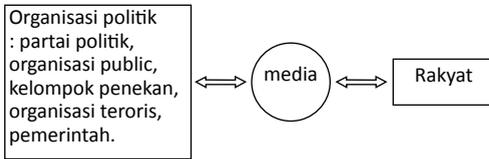
Bisa ditengok ke belakang beberapa partai politik yang pecah karena mengalami kegagalan konsolidasi. PKB pecah karena adanya tarik-menarik kepentingan politik di dalamnya. Munculah PKNU. PPP juga mengalami hal yang sama. Kemudian muncul PBR sebagai pesaingnya. PAN relative tidak terlihat gejolak tetapi bisa dilihat perkembangan internal yang kurang sehat. Hal ini terlihat dari intervensi politik pendirinya. PKS juga mendapatkan permasalahan dari sisi internal mereka juga. Kondisi ini hanya akan menjadi ganjalan pembentukan citra kepada voter. Apabila citra internal tidak terbangun dengan baik maka penyusunan agenda biasanya juga akan mengalami kegagalan. Karena penyusunan agenda akan tidak focus. Pembentukan citra internal partai secara lebih baik akan seiring dengan penyusunan agenda politik partai.



Skema pencitraan partai politik

Penyusunan agenda bisa menjadi hal yang penting untuk diperhitungkan dalam praktek politik partai. Dalam hal ini partai bisa menawarkan agenda politiknya ke voter melalui media yang kemudian dikonsumsi. Ada hubungan yang cukup signifikan antara organisasi politik dengan media dan rakyat. Setidaknya bisa dilihat dalam skema sebagai berikut.

Elemen komunikasi politik



Sebagai peserta proses demokrasi maka menjadi penting diperhatikan bahwa pilihan penyusunan agenda disesuaikan dengan proses demokrasi yang mementingkan nilai-nilai rasionalitas. Begitu juga partai politik Islam di Indonesia. Penting untuk diperhatikan adanya konsep penyusunan yang tidak meninggalkan aspirasi politik voter.

Islam menjadi nilai-nilai yang tidak lekang oleh zaman, tetapi pun begitu tetap membutuhkan energy yang sehat dan rasional untuk menafsirkan nilai-nilai politis Islam. Dimana Islam tidak terjebak dalam politik praktis yang kotor dan berdarah-darah seperti di negara-negara Timur Tengah. Tetapi Islam dikemas sedemikian rupa menjadi sajian yang elok dan anggun untuk kemudian bisa ditawarkan dalam sajian politik modern. Maka sistem politik demokrasi bukanlah sebuah batu sandungan dalam konsep politik Islam tetapi malah menjadi *significant others* yang kuat bagi perkembangan Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin*.[]

Daftar Pustaka

- Alfian.1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Fauzi, Ihsan Ali & Mujani, Saiful (editor). 2009. *Gerakan Kebebasan Sipil, Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syariah*. Nalar. Jakarta.
- Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.
- Hague, Rod & Harrop, Martin. 1998. *Comparative Government and Politics; an Introduction*. Macmillan Press, London.
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen. 2009. *Theories of Human Communication Edisi 9*. Salemba Humanika. Jakarta.
- McNair, Brian. 2003. *An Introduction to Political Communication*. Routledge. London.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- O'Donnell, Guillermo dan Schmitter, Phillippe C. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. LP3ES. Jakarta
- Sargent, Lyman Tower. 1990. *Contemporary Political Ideologies A Comparative Analysis*. Brooks/Cole Publishing. California.